

BONGKAR PENYOKONG KKB

DPR Minta Ketegasan Pemerintah

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

Dave Laksono mengatakan, aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu meneliti secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

"Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat pembangunan serta menewaskan warga sipil," kata Dave di Jakarta, Jumat (11/4).

Disebutkan, hal itu perlu dilakukan Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri. "Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka)," beber Dave.

Ia menilai, ketegasan Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA). "Kita harus bisa berpikir, mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan, Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas. "Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo Papua, 5-8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua," ucap Budi dalam keterangannya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan)

mengatakan, narasi yang menyebutkan, korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah RI dan TNI.

Kepala Biro Informasi dan Humas Kemhan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi tersebut, karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal. "Jadi, propaganda yang menyebutkan, itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar," kata Frega.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM) RI Atnike Nova Sigiro mengatakan, serangan KKB terhadap warga sipil di Yahukimo Papua, yang menyebabkan pendulang emas meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo," kata Atnike.

(Ant/Obi)-d

ANALIS MATA UANG DAN EMAS MENILAI

Berpotensi Tembus 3.500 Dolar AS/Troy Ons

JAKARTA (KR) - Analisis mata uang dan emas Lukman Leong menilai, harga emas diprediksi masih berpeluang melanjutkan rally dan bahkan menembus level 3.500 dolar AS pertroy ons. Hal ini dipengaruhi faktor meningkatnya kekhawatiran global dan melemahnya dominasi dolar AS sebagai aset lindung nilai utama.

"Sangat berpotensi 3.500 dolar AS (pertroy ons) sangat ideal, 3.800 dolar hingga 4.000 dolar pun tidak mengherankan. Iya, fase ini mulai di tahun 2024 ketika emas naik sekitar 27 persen. Sedangkan untuk 2025 sendiri hingga sekarang April telah naik kira-kira 20 persen," jelasnya kepada Antara di Jakarta, Jumat (11/4).

Menurut Lukman, tren masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas saat ini bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan bentuk kesadaran terhadap dinamika global dan pentingnya diversifikasi aset. Namun, ia mewanti-wanti terjadinya kelangkaan emas di dalam negeri mengingat permintaan emas fisik kian meningkat.

Sebagaimana diketahui, harga emas spot diketahui sempat menyentuh rekor tertinggi 3.219 dolar AS pertroy ons pada perdagangan Jumat. Menurut Lukman, lonjakan harga tersebut didorong oleh kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global akibat perang dagang yang terus bereskalasi.

Ia juga menyoroti posisi dolar AS sebagai aset *safe haven* yang kian tergerus oleh kebijakan kontroversial Pemerintah Negeri Paman Sam.

Meski harga emas telah mencetak rekor demi rekor, Lukman menilai instrumen emas tetap menarik untuk dimiliki. "Momentum tepat (beli emas) enggak juga, namun masih sangat menarik dan bijaksana untuk masih memegang atau menahan emas ataupun menambah kepemilikan," tuturnya.

Lukman menyarankan investor ritel tidak terburu-buru membeli dalam jumlah besar, melainkan menggunakan strategi *dollar cost averaging* secara bertahap untuk mengurangi risiko.

(Ant/San)-d

BERTEKAD TETAP TINGGAL DI GAZA

Warga Palestina Tolak Usulan Relokasi

GAZA (KR) - Warga Palestina menolak usulan relokasi Trump. Mereka bertekad untuk tetap tinggal di Gaza.

Di kota Khuza'a yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan, Hussam Dalloul Qudeih (41), merenungkan masa depannya saat menyaksikan matahari terbenam dari sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan. Sementara perang yang terus berlangsung dengan Israel memengaruhi seluruh aspek kehidupannya di Gaza.

"Kami adalah rakyat dari tanah ini. Akar kami sudah tertanam kuat. Bahkan jika kami harus tidur di bawah atap yang runtuh dan berjalan di atas pecahan kaca, kami tidak akan meninggalkan tanah ini," ujarnya, Jumat (11/4).

Perkataan Qudeih mencerminkan semangat perlawanan yang semakin kuat di kalangan warga Gaza setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankan agar mereka direlokasi ke ne-

gara lain. "Setiap kali terjadi perang, mereka membicarakan ke mana kami akan dikirim, misalnya Mesir, Turki, atau Eropa, tetapi tidak ada yang membicarakan hak kami untuk tetap tinggal (di tanah ini)," tandasnya.

Dalam pertemuan di Washington dengan Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (7/4), Trump menyebut Gaza sebagai 'sebidang real estat penting yang luar biasa' dan menyarankan agar warga Palestina dipindahkan ke negara-negara lain. Pernyataan Trump itu memicu kemarahan di seluruh wilayah Palestina, di mana banyak yang melihatnya sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menggesur rakyat Gaza. "Ini bukan ide baru. Ini kebijakan lama yang dibungkus dengan kata-kata baru," ujar Qudeih, yang seperti banyak warga Palestina lainnya telah beberapa kali mengungsi dalam beberapa bulan terakhir.

(Ant/Has)-f

Kunjungan Sambungan hal 1

Selama berpidato, Presiden Prabowo disambut dengan tepuk tangan meriah selama 17 kali dari anggota parlemen. Setelah itu, Presiden Prabowo juga disambut hangat Presiden Erdogan dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Turki. "Saya kira, saya diterima dengan baik di sini. Kita memang punya hubungan yang khusus dengan Turki," ucap Prabowo.

Turki menjadi negara kedua dalam rangkaian lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke kawasan Timur Tengah. Setelah menyelesaikan berbagai agenda di Ankara, Prabowo bertolak ke Antalya Turki, untuk menghadiri ADF dan menjadi salah satu pembicara di forum tersebut. Selanjutnya, Prabowo akan bertolak ke Mesir yang menjadi negara ketiga dalam lawatan kenegaraannya.

(Ant/Obi)-d

Korban Sambungan hal 1

Surawan menjelaskan pelaku menjalankan aksinya hanya seorang diri. Namun, saat memberikan pelayanan medis kepada pasien, pelaku didampingi oleh dokter utama. "Awalnya dengan dokter lain kemudian dia hubungi pasiennya dengan alasan akan melakukan uji anastesi dan pasien dipanggil dan dibawa ke ruangan yang sama," bebernya.

Dengan adanya dua korban baru, total kor-

ban dalam kasus ini kini menjadi tiga orang yang sebelumnya korban berinisial FH (21), yang merupakan keluarga pasien di RSHS dan menjadi korban pertama yang melapor. Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal bertapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. "Pelaku terancam pidana maksimal 17 tahun penjara," tandas Surawan. (Ant/Has)

URUSAN PERTANAHAN PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Meski Efisiensi Anggaran



Aris Eko Nugroho (kiri) menunjukkan melon premium di green house Kalurahan Merdikorejo.

YOGYA (KR) - Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, menginstruksikan penyelenggara negara melakukan efisiensi anggaran. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu yang terdampak adanya instruksi efisiensi anggaran sebesar Rp 200 miliar.

Menurut Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI, kondisi ini membuat seluruh pelaksanaan kegiatan keistimewaan di DIY harus melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun 2025, tidak terkecuali bagi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan.

Melakukan pencermatan ulang untuk menata lagi anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan

yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat.

"Paniradya Kaistimewan bersama dengan Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan Urusan Pertanahan, meskipun dengan adanya efisiensi anggaran," kata Aris.

Komitmen tersebut dijaga dengan tidak mengubah target pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Pertanahan pada tahun 2025, yaitu kegiatan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (SG dan PAG), Pendaftaran Tanah Kalurahan Pertama Kali, dan Pendaftaran Pencatatan Perubahan Tanah Kalurahan.

"Pelaksanaan kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan di tengah adanya efisiensi ini juga tetap berkomitmen untuk selalu menjaga tujuan pemerintah dalam peningkatan kese-

jahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan," jelasnya.

Hal ini, lanjut Aris, dikarenakan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana telah tercantum pada RPJMN 2025-2029, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tanah kalurahan dan tertib administrasi tanah desa menjadi bagian dari program prioritas Gubernur DIY yang tertera pada Peraturan Gubernur DIY No 52 Tahun 2023, serta telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY No 24 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemanfaatan Tanah Kalurahan dipergunakan untuk kegiatan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan dibuktikan dengan tidak adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tertib Administrasi Tanah Desa (Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan) pada tahun 2025.

"Pada tahun 2025 terdapat 38 kalurahan yang mendapatkan alokasi BKK Tertib Administrasi Tanah Desa (Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan) yang tersebar di empat kabupaten di DIY," katanya.

Aris menjelaskan, bantuan yang berasal dari Dana Keistimewaan tersebut dialokasikan untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dilaksanakan di atas Tanah Kas Kalurahan dan melibatkan penduduk miskin di kalurahan. Total penerima manfaat pada kegiatan BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan tahun 2025 berjumlah 1.506 KK. "Angka ini meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2024 yang melibatkan 12 kalurahan dengan total penerima manfaat sejumlah 524 KK," jelasnya.

Kegiatan pemanfaatan tanah kas kalurahan untuk pertanian ini dapat mengoptimalkan keterlibatan penduduk miskin di kalurahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalurahan dan mewujudkan prioritas nasional serta program prioritas Gubernur DIY.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengharap agar dalam mengelola alokasi anggaran BKK, Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. (Wan)

HASTO HORMATI HASIL PUTUSAN SELA

Eksepsi Ditolak, Sidang Dilanjutkan

JAKARTA (KR) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Atas dasar itu, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto dalam putusan selanya menyatakan keberatan Hasto dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima dan tidak beresalasan hukum. Hal ini karena penuntut umum telah menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan penyidikan tentang pidana yang

didakwakan.

"Untuk itu keberatan-keberatan formil yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi," kata ketua majelis hakim dalam amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/4).

Atas putusan sela itu, Hasto Kristiyanto menghormati sepenuhnya. Eksepsi, ujarnya, merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh terdakwa. Selain itu, merupakan bagian dari pendidikan politik kepada rakyat untuk melihat bagaimana seluruh aspek hukum yang seharusnya berkeadilan. Jadi, keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan

keadilan. "Karena, Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun sama saja tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan," ungkap Hasto usai sidang.

Menyinggung soal aspek materiil, majelis hakim telah menegaskan bahwa eksepsi dirinya harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, kata Hasto, dirinya bersama penasihat hukum siap menjalani sidang pemeriksaan tersebut. Ia juga tetap meyakini bahwa kasus yang didakwakan merupakan persoalan yang dipaksakan dan didaur ulang. "Dan membiarkan berbagai ketidakadilan yang terjadi sama saja dengan membunuh masa depan, tetapi pemeriksaan pokok perkara itu lah yang akan membuktikan," tuturnya. (Ful)-f

Parkir Sambungan hal 1

dari kebijakan yang tidak tepat," tandas Sultan HB X dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Objek Wisata Kota Yogyakarta bersama Walikota Yogyakarta dan Gedhong Pracimanasana, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (11/4).

Rakor juga dihadiri Wakil Walikota Yogyakarta, Sekda DIY beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY, dan Sekda Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran.

Sultan berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan

bersama, termasuk dalam menghadapi bencana alam dan masalah sosial lainnya. "Mari kita berempati kepada masyarakat dan tidak merasa berkuasa. Tetapi berkuasa untuk kepentingan masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Kita harus menyelesaikan semua masalah ini dengan baik," ungkap Sultan.

Sultan menyatakan, untuk pengelolaan Malioboro perlu ada edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Petugas kebersihan yang bekerja keras, seharusnya dibarengi dengan kesadaran pengelolaan sampah. Untuk itu

Gubernur DIY kembali mengingatkan, bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi aktif.

Sultan pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kawasan Malioboro yang semakin kumuh akibat parkir sembarangan dan kurangnya kesadaran pengunjung. "Dulu, becak di Malioboro hanya diparkir di tempat yang ditentukan, tetapi sekarang banyak yang parkir sembarangan. Hal ini membuat Malioboro terlihat kumuh dan tidak sedap dipandang," ungkapnya. (Ria)-d

Petaka Sambungan hal 1

Pualam Bahari di kotak terlarang. Namun, setelah wasit mengecek VAR, hadiah penalti tak jadi diberikan untuk PSS.

Setelahnya, PSBS berbalik meningkatkan tempo permainan. Penyakit PSS kembali kambuh di laga ini. Selepas 60 menit laga, PSS kehilangan fokus dan kondisi fisik pemain melemah. Pada

menit ke 66, PSBS mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

PSBS mencetak gol penyama melalui gol Williams Lugo pada menit 66. Berawal dari bola muntah hasil tepisan Alan Bernardon, bola disambar Williams Lugo dengan tendangan keras. Bola keras Williams Lugo gagal dihentikan Alan Bernardon.

Usai menyamakan kedudukan, daya ledak PSBS makin meningkat. Hanya berselang enam menit, PSBS mampu membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Ariel Nahuelpan mencetak gol menit 72 memanfaatkan umpan manis Rivaldo Todd Ferre. PSS kesulitan untuk mencetak gol penyama kedudukan hingga pertandingan berakhir. (Yud)-f

Tentara Sambungan hal 1

Namun pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam para penandatangan surat itu. "Mereka adalah kelompok ekstremis pinggiran yang kembali mencoba memecah belah masyarakat Israel dari dalam," katanya, seraya menuduh mereka memiliki satu tujuan, yaitu menjatuhkan pemerintahan.

Sementaara Kepala pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan surat tersebut merusak 'legitimasi' perang di Gaza, dan mendesak pimpinan militer serta

angkatan udara untuk menangani isu ini dengan cara yang paling tepat. Menurut harian Haaretz, Kepala Angkatan Udara Israel memutuskan untuk memberhentikan para cadangan aktif yang menandatangani surat tersebut, namun tidak menyebutkan jumlahnya.

Sementara itu, hampir 150 perwira Angkatan Laut Israel menandatangani petisi yang mendesak pemerintah Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza dan memastikan pembebasan

para sandera yang masih ditahan di sana, sebagaimana dilaporkan oleh harian Yedioth Ahronoth.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa ratusan prajurit yang pernah bertugas dan masih aktif dalam cadangan di Korps Lapis Baja dan Angkatan Laut turut bergabung dalam protes yang dipelopori Angkatan Udara, serta mengirim dua surat tambahan yang menuntut diakhirinya perang di Gaza dan pemulutan para sandera. (Ant/Has)-f